

# OPTIMALISASI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) (Studi Empirik Kegiatan KKN IAIN Sunan Kalijaga di Daerah Istimewa Yogyakarta)

. Zainal Abidin

*Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga*

## Abstract

Coping the problem of poverty, especially for poor people in destitute countries, is not an easy task. Studies of it are truly developing very fast now, for in the 90-s, poverty, destitute areas and the ways to tackle the problem became most people's focus of attention. But it does not mean that the effort has reached its desired goals successfully.

This paper will present a few results of empirical studies by the KKN program (Field-work Exercise) held by IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in the target areas: destitute villages as well as poor peripheral areas, in all districts of Yogyakarta Special Province.

## I. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan makanan yang teratur dan terus menerus pada tingkat yang menyamai atau melebihi tingkatan minimal untuk kelangsungan hidupnya. Kematian yang disebabkan oleh kelaparan, kecuali pada masa ada bencana akibat ulah manusia, sama halnya dengan keadaan kemiskinan yang paling parah.<sup>1</sup>

Manusia baru menempati tempat tinggal dengan tanpa pilihan, sebagaimana ia lahir tanpa dapat memilih siapakah ayahnya, di mana ia menghirup udara baru, apakah di daerah pantai, di pegunungan yang sejuk,

---

<sup>1</sup> Penny, DH., *Kemiskinan dan Peranan Sistem Pasar*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), p. 1

di puncak gunung yang dingin, di ngarai, di daerah perbukitan kapur yang sulit air, di tengah kota besar yang penuh hiruk pikuk, atau di daerah pedalaman yang miskin, di situlah ia dibesarkan dan berkembang. Lingkungan (alam maupun sosial) akan sangat berpengaruh bagi perkembangannya.

Pemiskinan, sama halnya dengan menjadi kaya, bukan semata-mata suatu proses ekonomi. Ia menyebabkan perubahan pada status sosial dan politik orang banyak, pada gerak akal budi dan pada pengertian mereka tentang apa yang terjadi di dunia. Tingkat pemiskinan yang paling jauh, yaitu mati karena kelaparan, juga merupakan titik terendah dalam kelangkaan kebendaan, karena itu merupakan masalah ekonomi yang paling mendasar.<sup>2</sup>

Bencana politik, kemanusiaan dan kelaparan yang terjadi seperti di Rwanda, Somalia, Ethiopia dan juga di belahan bumi yang lain, tidak saja mempersubur kemiskinan, tetapi juga membawa bencana musnahnya ratusan ribu bahkan jutaan umat manusia, betapapun itu tidak dikehendaki oleh bangsa dan negara manapun.

Sejak awal abad ke duapuluh sampai menjelang awal abad ke duapuluh satu, bangsa-bangsa Timur memang sudah berhasil melepaskan diri dari belenggu penindasan dan penjajahan bangsa-bangsa Barat, tetapi masih berada dalam kemelut penjajahan ekonomi dan budaya, sehingga tetap saja dihipnotis oleh kemiskinan, dan walaupun ada perbaikan nasib dan peningkatan kesejahteraan, relatif kecil dan berjalan lambat. Bahkan banyak negara ketiga yang mengalami surut ke belakang, oleh berbagai sebab.

Tirai kemiskinan telah turun di muka bumi, membelahnya, dari segi kebendaan dan pandangan hidup, menjadi dua dunia berbeda, dua planet terpisah, dua kelompok manusia tidak sederajat, yang satu teramat kaya, yang lain sangat melarat. Batas tidak terlihat oleh pandangan mata ini, kita jumpai dalam negara dan antar negara. Bagi negara-negara dunia ketiga, yang berbeda-beda satu sama lain dari segi ekonomi, politik dan budaya, batas inilah yang menjadi penyatu pandangan dan tujuan mereka. Berjuang menguak tirai kemiskinan adalah tantangan terberat yang dihadapi masa sekarang ini.<sup>3</sup>

Sampai saat ini sebenarnya pemerintah telah memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap usaha-usaha yang menyangkut pembangunan ekonomi. Pemerintah bahkan telah menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. xvii

<sup>3</sup> Mahbub 'ul Haq, *Tirai Kemiskinan Tantangan-Tantangan untuk Dunia Ketiga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983), p. 7

baru yang lebih baik dalam empat bidang yang merupakan kunci pemecahan masalah kependudukan, yaitu intensifikasi pertanian, keluarga berencana, industrialisasi, dan transmigrasi.<sup>4</sup>

Menurut A.M. Saefuddin<sup>5</sup>, ada tiga asas filsafat ekonomi Islam, yaitu : (1) Semua yang di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Manusia sebagai khalifah-Nya (pengganti Allah untuk mengelola bumi ini) berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Ini berarti bahwa hak manusia atas sumber-sumber alam dan harta kekayaan yang ada padanya adalah terbatas pada hak pengurusan dan pemanfaatannya saja, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah pemilik dan pencipta alam semesta. Ajaran yang menyatakan Allahlah pemilik dan pencipta alam semesta, langit dan bumi serta sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya merupakan landasan nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam; (2) Allah itu Maha Esa. Dialah pencipta segala makhluk yang ada di alam semesta. Salah satu makhluk ciptaan-Nya adalah manusia, yang diberi alat kelengkapan sempurna lebih dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai khalifah Allah di bumi ini. Semua makhluk lain, terutama fauna (hewani) dan flora (nabati) yang ada di alam semesta ini ditundukkan Allah kepada manusia, agar semua itu dapat dimanfaatkan oleh manusia bagi kepentingan dan kehidupannya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah itu, manusia yang berasal dari substansi yang sama, wajib saling bantu membantu dan bekerja sama terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluannya berdasarkan persamaan dan persaudaraan; (3) Beriman kepada hari kiamat dan kepada hari pengadilan. Keyakinan kepada hari akhir atau pada hari kiamat ini merupakan asas penting dalam Sistem Ekonomi Islam karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia di dunia ini akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya, termasuk tindakan ekonominya, akan diminta pertanggungjawabannya itu tidak hanya mengenai tingkah laku (ekonominya) saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan Allah kepada manusia.

---

<sup>4</sup> Masri Singarimbun dan DH. Penny, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1984), p. 68

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), p. 5-6

Sebelum memasuki uraian lebih lanjut, ingin penulis menyinggung mengenai perintah agama untuk mengentaskan kemiskinan, upaya mendasar yang merupakan kemauan politik pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat serta peranan strategis IAIN sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia, yang sekaligus sebagai 'aset' pembangunan nasional; yang dengan demikian secara mikro akan mengantarkan pemahaman yang menyeluruh mengenai butir-butir program KKN IAIN.

Butir-butir ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an berfungsi untuk menuntun manusia bagi kehidupan yang lebih baik. Prinsip-prinsip seimbang, selaras, serasi, saling tolong menolong dan menyantuni yang lemah ternyata banyak ditekankan oleh firman Allah semisal: "Allah menggembirakan (hati) orang yang suka mendermakan hartanya di jalan Allah dan memberikan pahala berlipat ganda di dunia dan akhirat" (Q.S. 2 Surat al-Baqarah: 245); "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah laksana menanam sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dan pada setiap tangkai melahirkan seratus biji atau buah" (Q.S. 2. Surat al-Baqarah: 261); "Allah memerintahkan orang-orang beriman mengeluarkan sebagian dari harta bendanya untuk kebajikan. Yang dikeluarkan itu hendaklah yang berkualitas baik, bukan yang buruk-buruk" (Q.S. 2. Surat al-Baqarah : 267); "Allah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (Q.S. 4. Surat an Nisā' : 58); "Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan" (Q.S. 9. Surat at Taubah : 60); "Dalam membelanjakan harta, janganlah manusia terlalu kikir dan jangan pula terlalu pemurah" (Q.S. 17. Surat al-Isrā' : 29); "Harta kekayaan hendaklah menjadi sarana menuju kebaikan hidup di akhirat" (Q.S. 28. Surat al-Qashash : 77); "Di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang meminta-minta dan hak orang (miskin) yang diam saja" (Q.S. 51. Surat adz Dzāriāt: 19); dan "Adalah sama dengan mendustakan agama, bila orang menelantarkan dan tidak memberi makan anak yatim" (Q.S. 107. Surat al-Mā'ūn : 1-2).

Prinsip-prinsip umum menyantuni kaum lemah sebagaimana disebut di atas, pelaksanaannya secara detail/terperinci dari masing-masing negara atau bangsa, berbeda-beda. Sesuai dengan prinsip-prinsip universal, keluasan dan keluwesan butir-butir ajaran Islam, upaya pengentasan kemiskinan akan selalu dapat diinterpretasikan dengan interpretasi-interpretasi baru sesuai dengan perubahan dan kemajuan zaman. Apabila kita



mengambil contoh secara makro di Indonesia, Perguruan Tinggi sebagai tempat untuk menyemai calon-calon tenaga profesional dan pemimpin bangsa, Garis-Garis Besar Haluan Negara menekankan: Perguruan Tinggi diusahakan agar mampu menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kegiatan mahasiswa dan ilmuwan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya, antara lain dengan jalan mendorong pengembangan wadah disiplin keilmuan, para mahasiswa dan ilmuwan dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasinya untuk berperan serta dalam pembangunan. Sejalan dengan itu terus dikembangkan iklim yang demokratis yang mendukung kebebasan akademik, dan otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan agar sivitas akademika secara bertanggungjawab dapat mengembangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan maupun bagi pembangunan nasional.<sup>6</sup>

GBHN 1993 menempatkan manusia sebagai pusat segenap upaya pembangunan. Pembangunan Nasional bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumberdaya pembangunan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Upaya ini digariskan dalam GBHN 1993 sebagai sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua yaitu terciptanya kualitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri.<sup>7</sup>

Mulai Pelita VI dilancarkan program khusus, yaitu program tambahan di samping program-program pembangunan yang telah ada, dinamakan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Inpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin. Melalui Inpres ini dipadukan program-program sektoral maupun regional yang mencakup desa-desa tersebut, sehingga secara efektif akan berdampak besar terhadap penanggulangan kemiskinan.

IAIN sebagai salah satu perguruan tinggi negeri dalam kedudukannya sebagai aset pembangunan nasional, sudah barang tentu juga mengemban tugas, fungsi dan tanggungjawab mewujudkan tridarmanya bagi pem-

---

<sup>6</sup> Garis-Garis Besar Haluan Negara RI Tahun 1993, (Semarang: Aneka Ilmu, 1993), p. 177-178

<sup>7</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Departemen Dalam Negeri, *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*, (Jakarta, 1993), p. 1

bangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran serta IAIN menjadi bagian integral dari peran serta perguruan tinggi secara nasional dalam pembangunan bangsa. Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang harus ikut secara aktif dalam proses pembangunan, harus ikut serta secara langsung ke tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang agama, baik di bidang fisik materiil maupun di bidang mental spiritual keagamaan.

IAIN diharapkan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan Islam sebagai sumbangan untuk memajukan masyarakat. Jika agama khususnya Islam dapat mempunyai peranan sebagai motivator dan dinamisator pembangunan nasional, maka IAIN dituntut untuk menggali ajaran Islam dalam rangka menumbuhkan motivasi dan mendinamisir masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan nasional dan kemudian memanfaatkan nilai-nilai ajaran agama itu bagi kepentingan masyarakat, serta lebih khusus lagi, bagi pengentasan kemiskinan.

Kuliah Kerja Nyata sebagai program nasional pendidikan tinggi di Indonesia adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang terpadu antara pengabdian pada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan secara interdisipliner, dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan-permasalahan yang muncul adalah: pertama, bagaimana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui program kegiatan KKN mahasiswa merencanakan program-program strategis bagi peningkatan taraf hidup masyarakat atau khalayak sasaran; dan kedua, bagaimana operasionalisasi program-program pengentasan kemiskinan (baik materi maupun non materi) yang telah dilakukan melalui program kegiatan KKN mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

## **II. Landasan Teori**

### **A. Pengentasan Kemiskinan**

Menurut Mubyarto,<sup>8</sup> kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi pada seseorang atau sebuah keluarga bukan karena dikehendaki,

---

<sup>8</sup> Mubyarto, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Makalah Seminar Nasional "Peranan IPTEK dalam rangka Pengentasan Kemiskinan"*, (Yogyakarta: Panitia HUT KORPRI, 1993), p. 1

melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan dan keterbelakangan terjadi akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat tidak memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan. Demikian pula, kesenjangan sosial ekonomi timbul karena sebagian masyarakat tidak memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan, sementara sebagian lainnya memilikinya secara berlebihan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan, sumberdaya pembangunan yang lebih besar perlu disalurkan kepada lapisan masyarakat miskin. Untuk melepaskan orang miskin dari lingkaran kemiskinan diperlukan adanya sumberdaya pendukung dari luar berupa modal kerja, ketrampilan, wawasan pembangunan, hubungan sosial, dan lain-lain.

Dalam pada itu, desa disebut miskin apabila desa yang bersangkutan terpencil atau terisolasi, sumberdaya alamnya serba terbatas, sehingga mengakibatkan sumberdaya manusianya terkungkung kebodohan dan keterbelakangan.

Melakukan identifikasi desa di mana penduduk miskin tinggal memang tidak mudah. Namun demikian, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam makalah seminar yang bertema "*Desa Tertinggal di DIY: Permasalahan dan Strategi*", menyebutkan beberapa variabel dan indikator yang menyebabkan kemiskinan suatu desa, antara lain adalah: (1) letak geografis yang kurang menguntungkan (seperti desa pantai dan desa pegunungan), (2) keadaan sumberdaya manusia yang kurang terampil, (3) fasilitas dan sarana angkutan yang kurang memadai, dan (4) tingkat kepadatan penduduk.<sup>9</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Sunyoto dalam makalahnya yang berjudul "*Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kehidupan Pedesaan*" juga berpendapat bahwa sebab dari kemiskinan adalah: pertama, keadaan sumberdaya alam yang rendah, kedua sumber daya manusia yang rendah, dan ketiga, kesadaran yang rendah dari sumber daya manusia dan sumber daya alam di sekitarnya. Adapun yang menurutnya lebih menyebabkan kemiskinan adalah adanya semboyan bahwa Indonesia adalah bagaikan mutu manikam dan zamrud katulistiwa, subur makmur loh jinawi, dst, sehingga menyesatkan terhadap *fighting spirit* seluruh bangsa dalam menghadapi realitas faktual.

---

<sup>9</sup> Sri Sultan Hamengkubuwana X, "*Desa Tertinggal di DIY: Permasalahan dan Strategi*", *Makalah Seminar Nasional Peranan IPTEK Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Panitia HUT KORPRI, 1993), p. 10

Dengan demikian, maka untuk menentukan status kemiskinan suatu desa diperlukan suatu indikator komposit baru, yang merupakan gabungan dari berbagai faktor yang menunjukkan ciri-ciri kemiskinan, yang dipilih dan diolah menjadi 3 kelompok, yaitu: potensi desa (podes) dan fasilitas desa, keadaan perumahan dan lingkungan, serta keadaan penduduknya.<sup>10</sup>

Menurut Oscar Lewis (1969), masih ada suatu fenomena lagi yang sering disebut "kebudayaan kemiskinan". Menurutny tidak semua kaum miskin menganut kebudayaan kemiskinan dan adalah jauh lebih sukar menghapus kebudayaan kemiskinan dari pada kemiskinan itu sendiri. Ciri-ciri kemiskinan yang menonjol adalah adanya sistem hubungan subkultur kemiskinan dengan masyarakat umum miskin, sifat keluarga kaum miskin, dan sikap nilai dan karakter individu yang miskin, serta kesadaran bahwa dirinya miskin.<sup>11</sup>

Masyarakat miskin identik dengan masyarakat pra-sejahtera dengan ciri-ciri: 1) belum mengamalkan ajaran agamanya (baca: apabila beragama Islam, belum shalat), 2) lantai rumah dari tanah, 3) makan kurang dari dua kali sehari, 4) pakaian tidak ganti-ganti, 5) apabila sakit tidak mampu berobat.

Program penanggulangan kemiskinan idealnya dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terdapat di masing-masing daerah, karena bobot dan jenis masalah yang dihadapi penduduk miskin di setiap daerah tidak sama. Di samping itu, menurut Safrudin, penanggulangan kemiskinan harus merupakan program yang berkelanjutan, yaitu program yang dapat terus menerus berjalan dan dapat mandiri. Artinya perlu dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu kemampuan penduduk untuk menolong diri mereka sendiri.<sup>12</sup>

Menurut Safrudin<sup>13</sup>, berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh BPPT dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah desa miskin, merekomendasikan agar upaya pengentasan kemiskinan dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah, setidaknya

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Syarifjoto, "Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kehidupan Pedesaan", *Makalah Seminar Nasional Peranan IPTEK dalam rangka Pengentasan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Panitia HUT KORPRI, 1993), p. 2

<sup>12</sup> Safrudin, "Iptek Pedesaan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan", *Makalah Seminar Nasional Peranan IPTEK dalam rangka Pengentasan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Panitia HUT KORPRI, 1993), p. 3-4

<sup>13</sup> Ibid., p. 5-6

harus meliputi perbaikan akses terhadap enam hal, yaitu: pertama, akses terhadap sumberdaya, mendorong masyarakat pedesaan untuk ikut berpartisipasi aktif mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di daerahnya dengan masukan teknologi tepat guna.

Kedua, akses terhadap pasar, maksudnya produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyesuaian sasaran produksi dan peningkatan ketrampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus menerus.

Ketiga, pendidikan ketrampilan. Upaya perbaikan kualitas sumberdaya manusia merupakan tekanan yang paling utama seyogyanya diberikan. Keempat, teknologi tepat guna. Upaya pemasyarakatan teknologi tepat guna mencakup ditingkatkannya kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hasil penelitian melalui publikasi dan pengembangan pelayanan pusat dokumentasi dan informasi. Demikian pula upaya ini juga dapat dilaksanakan dengan menggali teknologi lokal (*indigenous technology*) yang sudah ada di masyarakat pedesaan dan kemudian mengembangkannya dengan mengintegrasikannya dengan teknologi maju.

Kelima, pertumbuhan penduduk yang terkendali. Keluarga kecil yang sejahtera adalah salah satu faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu kebijakan di bidang kependudukan terutama program KB perlu diarahkan kepada mereka yang berpendidikan rendah.

Keenam, teknologi perlindungan lingkungan. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan kelestarian lingkungan. Lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan didistribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata.

Berdasarkan pengalaman selama PJP I, terdapat program-program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan yang dapat dikategorisasikan menjadi tiga: (1) program yang memang ditujukan kepada golongan miskin, seperti misalnya program kejar paket A, kejar usaha, program penyaluran keluarga miskin, (2) program (sektoral) yang ditujukan kepada golongan menengah ke bawah, seperti program peningkatan produksi pertanian, pengembangan industri kecil, pengembangan koperasi, (3) program yang secara tidak langsung berdampak kepada peningkatan kesejahteraan golongan miskin, seperti program rehabilitasi investasi dalam bentuk pengembangan industri dan pembangunan irigasi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Depdagri, "Prospektif dan Problematika Pembangunan Desa Miskin", *Makalah Dies*



## B. Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berstatus intrakurikuler, pengelolannya harus dilakukan dengan sistem; karena dengan sistem tersebut, pelaksanaan KKN yang berkesinambungan dari tahun ke tahun akan memudahkan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Kebijakan pelaksanaan KKN harus didasarkan pada hal-hal yang bersifat baku meskipun dari waktu ke waktu tetap dapat dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.<sup>15</sup>

Secara teoritik, Kuliah Kerja Nyata mempunyai beberapa tujuan, di antaranya: (1) mencetak sarjana yang generalis penerus pembangunan yang lebih menghayati masalah yang sangat kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan dan belajar menanggulangi masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan interdisipliner; (2) mendekatkan Perguruan Tinggi kepada masyarakat, dan lebih menyesuaikan pendidikan bagi tuntutan pembangunan; (3) membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di desa; (4) berusaha membantu masyarakat memecahkan problema yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin; (5) berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemantapan Ketahanan Nasional; (6) melestarikan agama sebagai pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat sehingga pembangunan merupakan amal ibadah; (7) membentuk Sarjana Muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan cakap serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab atas kesejahteraan umat serta masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila; (8) mendapatkan umpan balik untuk bahan penyempurnaan Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Kuliah Kerja Nyata mempunyai tiga sasaran, yaitu mahasiswa, masyarakat dan perguruan tinggi. Pertama, bagi mahasiswa. Melalui kegiatan KKN, diharapkan mahasiswa mampu: (1) memperdalam pengertian terhadap cara berpikir dan bekerja interdisipliner, sehingga dapat menghayati adanya ketergantungan, kaitan kerja sama antar sektor; (2) memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap kegunaan agama, ilmu, seni budaya yang dipelajarinya bagi pelaksanaan pembangunan; (3) mem-

---

Natalis ke 44 UGM Tanggal 29 Nopember 1993, (Jakarta: Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri, 1993), p.4-5

<sup>15</sup> BPPM-P3M IAIN Sunan Kalijaga, *Laporan KKN IAIN Sunan Kalijaga Angkatan ke-25*, (Yogyakarta: BPPM-P3M, 1993), p. 3.

perdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; (4) memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa terhadap seluk beluk keseluruhan dan masalah pembangunan dan perkembangan masyarakat; (5) mendewasakan cara berfikir serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah secara pragmatis ilmiah; (6) memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan masyarakat berdasarkan ilmu, teknologi dan seni secara interdisipliner atau antar sektor; (7) membina mahasiswa menjadi seorang innovator, motivator, dinamisator dan *problem solver* serta *religious counselor* atau pembimbing keagamaan; (8) memberikan pengalaman dan ketrampilan belajar dan bekerja kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan, agar terbentuk sikap dan cinta terhadap kemajuan masyarakat sehingga kelak bila telah menjadi sarjana sanggup ditempatkan di mana saja; (9) melalui pengalaman bekerja dalam melakukan penelaahan, merumuskan dan memecahkan masalah secara langsung akan lebih menumbuhkan sifat profesionalisme dalam diri mahasiswa dalam arti peningkatan keahlian, tanggungjawab maupun rasa kesejahteraan.

Kedua, bagi masyarakat. Dengan adanya kegiatan KKN diharapkan masyarakat akan: (1) memperoleh bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, teknologi, seni dan pembimbing keagamaan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan; (2) cara berfikir, bersikap dan bertindak dari masyarakat akan lebih ditingkatkan sesuai dengan derap pembangunan; (3) memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pembangunan; (4) memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan; (5) terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan; (6) memanfaatkan bantuan tenaga mahasiswa untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Ketiga, bagi Institut/Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan KKN Perguruan Tinggi akan: (1) memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswanya dengan proses pembangunan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan pengembangan ilmu yang diasuh IAIN dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan; (2) memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan

dan menentukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian; (3) memperoleh hasil kegiatan mahasiswa, dapat menelaah dan merumuskan keadaan dan kondisi nyata masyarakat yang berguna bagi pengembangan ilmu, teknologi, seni, agama serta dapat mendiagnosa secara tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu, teknologi, seni, dan agama yang diamanahkan dapat sesuai dengan tuntutan nyata; (4) meningkatkan, memperluas dan mempercepat kerjasama dengan instansi serta departemen lain melalui rintisan kerjasama dari mahasiswa yang melaksanakan KKN.<sup>16</sup>

### III. Metode Penelitian

Kajian ini adalah kajian pustaka. Data-data primer diperoleh dari laporan-laporan hasil pelaksanaan program kegiatan KKN mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun untuk data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan baik dalam bentuk buku maupun makalah seminar yang temanya terkait dengan persoalan kemiskinan.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan mengikuti alur sebagaimana yang disarankan oleh Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman (1992), dalam bukunya "Analisis Data Kualitatif", yakni dengan membagi analisis menjadi empat bagian / langkah kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>17</sup>

### IV. Hasil dan Analisis

#### A. Kegiatan KKN Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN diharapkan pada titik tekan sekitar: "Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Insani Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya", dengan sub thema: "Dengan Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Insani Kita Wujudkan Upaya Pengentasan Kemiskinan".

Target yang akan dicapai KKN: (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat

---

<sup>16</sup> PPM IAIN, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata*, (Yogyakarta: Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), p. 11-13

<sup>17</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah, Tjetjep Rohendi Ruzidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), p. 16

material dan mental spiritual; (2) Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam memecahkan problematika yang mereka hadapi; (3) Penghayatan dan pengamalan keagamaan masyarakat semakin baik, dan menginsyafi betapa pentingnya peranan agama dalam setiap aspek kehidupan manusia, di mana melalui bahasa agama dapat memecahkan berbagai problematika dalam kehidupan sehari-hari; (4) Timbulnya kesadaran dan tanggungjawab mahasiswa IAIN untuk mengerti masalah-masalah pedesaan sebagai basis pembangunan dan pembinaan umat Islam; (5) Terlaksanannya program kerja individual dan program kerja kolektif sebagai sumbangan almamater terhadap masyarakat, dalam rangka menunjang pembangunan nasional; (6) Terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga mahasiswa IAIN dalam rangka mengakhiri studinya, dapat memiliki Sertifikat, sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi.

Di lingkungan IAIN, KKN merupakan program intrakurikuler, sehingga menjadi Mata Kuliah Wajib pada fakultas-fakultas di lingkungan IAIN, serta sebagai syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program Sarjana.

Sedangkan sifat KKN adalah kontinuitas atau kesinambungan dari tahun ke tahun. Sebagai kegiatan yang berstatus Intrakurikuler, maka kegiatan KKN terjadwal dalam Kalender Akademik IAIN.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) mempunyai bobot akademik 4 (empat) Satuan Kredit Semester (SKS) setara dengan 273 jam. Jumlah SKS itu mencakup empat komponen kegiatan KKN, yaitu pembekalan, penyusunan program kerja lapangan, pelaksanaan program lapangan dan penyusunan laporan akhir.<sup>18</sup>

Program KKN selama di lapangan, meliputi bidang: Agama, Prasarana Fisik dan Lingkungan Hidup, Administrasi Pemerintahan, dan bidang Pendidikan, Sosial Budaya, Kesehatan dan KB.

Keempat bidang program tersebut relevan dengan rekomendasi tentang tema KKN IAIN yakni "Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Insani melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya", dengan sub tema "Dengan Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Kualitas sumber Daya Insani Kita Wujudkan Upaya Pengentasan Kemiskinan". Keempat bidang ini dibagi menjadi program wajib, yaitu bidang agama, dan program pilihan bagi masing-masing individu atau peserta, yaitu ketiga bidang lainnya. Kepada mahasiswa peserta KKN, pada waktu pendaftaran ulang telah diisyaratkan untuk memilih program individual, yaitu salah

---

<sup>18</sup> PPM IAIN, *Buku Pedoman KKN*, p.14



satu dari tiga bidang yang ada.

Pilihan tersebut ditawarkan agar sejak awal sebelum mahasiswa terjun ke lapangan, yang bersangkutan sudah dapat membuat rencana program kerja, sehingga mempunyai bayangan apa yang hendak digarap setelah berada di lokasi.

Adapun program wajib bagi semua peserta, yaitu bidang agama, karena agama adalah merupakan tugas pokok dan bidang garap utama dari setiap mahasiswa peserta KKN IAIN.

Dalam setiap kegiatan KKN, selalu ada pembimbing atau pengawas. Adanya pembimbing atau pengawas dimaksudkan untuk memberikan pengarahan, membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa di lapangan, agar kegiatannya dapat terarah dan berlangsung sesuai dengan rencana. Di samping itu juga untuk mengontrol dan mengawasi tindakan sehari-hari dan kegiatan pelaksanaan program kerja mahasiswa, agar program kerja berjalan lancar sesuai dengan sasaran. Bimbingan dan pengawasan ini mengikuti sistem "tut wuri handayani", dan dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yang diambil dari Fakultas-fakultas di lingkungan IAIN. Para DPL tersebut merupakan pembimbing formal, yang dalam tugasnya berperan sebagai: pembimbing, pengarah, penghubung, motivator, pengawas, penilai, penyuluh, dan pemberi contoh/suri tauladan.

Selain pembimbing formal, juga ada pembimbing non formal yang terdiri dari Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dari lokasi KKN. Ada pula pembimbing informal terdiri dari Bapak/Ibu dari keluarga yang rumahnya dijadikan sebagai tempat pemondokan (*living cost*).

Salah satu program KKN adalah agar mahasiswa menjadi seorang generalis yang mumpuni. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka materi bimbingan dan pengawasan tidak terlepas dari materi yang telah diberikan pada masa latihan/pembekalan atau training KKN. Namun demikian, juga tidak dapat terlepas dari masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi mahasiswa di lapangan, karena dalam kenyataan banyak masalah-masalah yang timbul, berkembang dan terdapat pada masyarakat pedesaan, di mana masalah-masalah tersebut tidak tercakup dalam materi program training yang diberikan.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, jika Dosen Pembimbing Lapangan sering mengadakan bimbingan dan pengawasan, maka program KKN biasanya semakin lancar dan lebih berhasil. Sebab dengan seringnya



DPL melakukan bimbingan, maka masalah-masalah yang muncul dapat segera diatasi. Di samping itu, semangat mahasiswa juga tinggi, karena merasa diperhatikan.

Agar bimbingan tepat sasaran, DPL juga perlu meminta informasi dari Camat, pamong desa, masyarakat, tentang aktivitas mahasiswa KKN sehari-hari, di samping, data tentang itu dapat dipantau melalui buku Catatan Kegiatan Harian mahasiswa.

Program paska KKN ditujukan untuk menindaklanjuti program atau kegiatan yang tahapannya memerlukan pelaksanaan, pengembangan, tindak lanjut dan pemantauan. Pelaksanaan program paska KKN merupakan salah satu bentuk kerjasama dari berbagai unsur yaitu masyarakat, dinas atau instansi terkait, tenaga pengajar/mantan DPL atau mahasiswa angkatan berikutnya.

Penyempurnaan dan pengembangan pelaksanaan KKN diupayakan melalui lokakarya atau seminar mengenai re-orientasi dan re-evaluasi pelaksanaan KKN dengan mengadakan monitoring terhadap desa yang pernah menjadi lokasi dan dengan kegiatan Desa Binaan.

Untuk menterjemahkan kebijakan-kebijakan bagi melaksanakan program KKN, disusunlah program kegiatan dalam berbagai bidang, dengan terlebih dahulu mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang berkembang di masing-masing lokasi. Oleh karena lokasi KKN IAIN cenderung memilih daerah-daerah/desa-desa yang miskin, terisolir dan belum maju, maka permasalahan-permasalahan yang muncul sangat kompleks.

Dengan mengambil lokasi beberapa wilayah yang menantang, dapat dirangkum identifikasi masalah yang pada umumnya hampir sejenis, baik yang terkait dengan bidang agama, prasarana fisik lingkungan hidup, administrasi, dan bidang pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan Keluarga Berencana.

Program kegiatan KKN pada umumnya disesuaikan dengan masalah/kebutuhan masyarakat, mulai dari masalah-masalah yang bersifat praktis sampai program untuk merubah pola tata pikir masyarakat untuk menerima perubahan menuju pembaharuan dan kesejahteraan masyarakat, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Program-program tersebut selanjutnya diurai dalam banyak butir.<sup>19</sup>

Operasionalisasi butir-butir program selalu disesuaikan dengan lokasi/

---

<sup>19</sup> Uraian tentang butir-butir jabaran dari program kerja bidang agama, fisik, administrasi,

lingkungan pemukiman masyarakat, baik di wilayah pantai, daerah pegunungan, daerah gersang yang terpencil, wilayah pinggir/bantaran sungai, daerah kumuh, di pinggiran kota dan lain-lain.

## **B. Operasionalisasi Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program KKN**

Untuk mensukseskan program kegiatan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dalam kaitan dengan program pengentasan kemiskinan melalui KKN ditempuh suatu strategi penentuan lokasi.

Menurut Armai Arief<sup>20</sup>, ada beberapa macam jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam penentuan lokasi KKN. Pertama, pendekatan pusat-pusat pertumbuhan (*growth center*), yang memprioritaskan tempat-tempat atau desa-desa strategis yang diharapkan dapat menarik desa-desa lain di sekitarnya. Kedua, pendekatan sektoral, yaitu tempat-tempat atau desa-desa yang dipilih adalah desa yang memungkinkan memperoleh proyek-proyek pembangunan melalui sektor-sektor tertentu, misalnya sektor pertanian, pendidikan, dan sebagainya. Ketiga, pendekatan wilayah, yaitu yang memilih secara langsung wilayah-wilayah terisolasi dengan desa sasaran adalah desa termiskin dan bertujuan untuk menjembatani jurang kesenjangan ekonomi dan sosial, baik antar kelompok masyarakat maupun antar daerah.

Dalam prakteknya, PPM IAIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga yang menangani kegiatan KKN mahasiswa selalu mempertimbangkan dan menjadikan ketiga macam alternatif pendekatan di atas sebagai acuan dalam penentuan lokasi KKN. Bahkan pihak PPM IAIN selalu melakukan konsultasi dan survei dengan pihak pemerintah daerah. Konsultasi ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan dukungan pemerintah baik secara materiil maupun proses. Sebab dalam kenyataan, untuk mensukseskan program KKN, pihak IAIN jelas tidak dapat berdiri sendiri, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Memadukan program-program mahasiswa KKN dengan ikhtiar pengentasan kemiskinan di pedesaan memang memiliki tantangan khusus dan diperlukan kesabaran, sebab selain masa kerja mahasiswa di lokasi relatif

---

dan pendidikan sosial budaya dan kesehatan serta KB dapat dibaca pada *Laporan Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Angkatan ke-25*, (Yogyakarta: BPPM-P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1993), p. 54 - 55.

<sup>20</sup> Armai Arief, "Pokok-pokok Pikiran Tentang Desa Binaan/KKN", *Makalah*, (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), p. 1

pendek, ternyata masyarakat pedesaan kurang menyadari kalau mereka hidup dalam kekurangan, istilah lain dari kemiskinan.

Dalam waktu yang relatif panjang, dari generasi ke generasi, mereka hidup dalam suasana serba kekurangan (gizi, air bersih, pendidikan, ekonomi, tuntunan moral, tempat tinggal, hiburan, dan lain-lain), dan itu semua mereka anggap sesuatu yang sudah biasa dan memang harus dijalani.

Survei untuk memilih lokasi KKN (beberapa dusun dari suatu desa atau beberapa desa dari suatu kecamatan) agar sesuai dengan kriteria sasaran, memerlukan waktu, pendekatan, metode, diskusi dan strategi kebijakan yang bersifat khusus.

Dari pilihan lokasi tersebut dikonsultasikan dengan pihak pemerintah daerah dan instansi terkait, agar prinsip-prinsip interdisipliner, komprehensif, lintas sektoral dan berkesinambungan dapat dilakukan. Proses permohonan rekomendasi dan izin kegiatan di lapangan, dapat dijadikan sarana konsultasi agar kerjasama antara pihak kampus dengan aparat daerah/desa dapat berjalan secara sinergis dan lancar.

Komunikasi yang intens ternyata membawa hasil yang cukup memuaskan. Misal, keluarnya bantuan materiil yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk dana stimulan KKN melalui APBD tahunan. Memang jumlah nominal yang diterima tidak banyak tetapi setidaknya bisa merangsang mahasiswa untuk memulai aktivitas KKN di lokasi dan tumbuhnya swadaya masyarakat. Demikian pula apabila ada persoalan, dapat segera diatasi/diselesaikan.

### **C. Hasil Empirik Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program KKN**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kegiatan KKN mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi beberapa macam bidang garapan, yang secara umum menyentuh aspek fisik dan non fisik. Selama ini sasaran KKN lebih banyak tercurah ke masyarakat pedesaan dan masyarakat pinggiran kota. Namun demikian porsi terbesar lebih ke masyarakat pedesaan, terutama masyarakat desa tertinggal.

Hal tersebut memang sesuai dengan maksud awal dari program KKN mahasiswa yang memang diharapkan mampu mendorong pembangunan di pedesaan. Bahkan satu hal yang menarik, sebagaimana diakui Armai Arief<sup>21</sup>, adalah bahwa pada umumnya KKN yang dilaksanakan oleh Maha-

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 3-4

siswa IAIN dianggap cukup berhasil, setidaknya bila diukur dengan kemampuan mahasiswa masuk ke dalam kehidupan masyarakat pedesaan, dengan modal pendekatan agama. Tetapi kalau tingkat keberhasilan KKN itu diukur dengan kemampuan mahasiswa meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan, tentulah kesannya akan lain.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa di satu sisi IAIN sebenarnya telah memiliki model pendekatan agama, namun di pihak lain masih belum sepenuhnya berhasil karena terbatasnya bidang keahlian yang dimiliki.

Meskipun jika diukur dari tingkat keberhasilan secara materiil kegiatan yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan melalui program KKN mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mungkin belum maksimal, tetapi dari beberapa laporan pelaksanaan KKN yang ada menunjukkan bahwa melalui KKN ternyata ada akses yang diberikan kepada masyarakat untuk mengangkat mereka dari lingkaran kemiskinan.

Untuk memberi gambaran bagi upaya pengentasan kemiskinan di berbagai daerah lokasi KKN, khususnya menyangkut bidang agama dan ekonomi, akan dirangkum lima lokasi yang berada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul dan Sleman.

Pertama, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Daerah sasaran dipilih di RT 38 RW 09 yang penduduknya mukim di tepi sungai Gajah Wong. Pemukiman tersebut merupakan pemukiman baru, pindahan dari hunian di sekitar stasiun Tugu (dulu: Bong Suwung, sekarang kantor Samsat). Tingkat perekonomian penghuni rendah, permasalahan yang muncul dan mendesak adalah kendala kebutuhan air bersih, peningkatan pendapatan ekonomi keluarga dan pengamalan hidup beragama yang masih kurang.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemanfaatan tempat ibadah (mushalla baru) bagi aktifitas keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, dorongan bagi peningkatan etos kerja, pemanfaatan dasa wisma sebagai media pertemuan rutin dan usaha peningkatan penghasilan ekonomi keluarga. Sedang bantuan diusahakan bagi pemberdayaan SDM agar memiliki penghasilan rutin, seperti pengadaan becak (jual jasa/tenaga), pengadaan alat-alat industri rumah tangga/home industri, alat produksi ikat pinggang, dan juga peralatan pertukangan (kayu/batu), serta pengadaan alat cetak konblok atau batako.<sup>22</sup> Dengan bantuan yang ada diharapkan

---

<sup>22</sup> PPM IAIN, *Laporan Pelaksanaan KKN Angkatan ke-42*, (Yogyakarta: PPM IAIN Sunan



masyarakat semakin berdaya bagi perbaikan kualitas hidupnya. Mahasiswa berusaha menggesek anggota masyarakat agar memiliki kerangka berpikir yang positif, dan secara ideal dan makro, diharapkan dapat diwujudkan anggota masyarakat yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, trampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, pekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif. Hanya dengan anggota masyarakat dengan kualifikasi yang demikian, secara berangsur-angsur, akan optimis mentas dari kungkungan kemiskinan.

Betapapun setiap binatang melata (*daabbah*) atau makhluk hidup di bumi termasuk di dalamnya manusia telah dijamin rezekinya oleh Allah (Q.S. 11 Surat Hud, 6); dan tiap-tiap usaha manusia itu kemanfaatannya kembali pada dirinya sendiri (Q.S. 29 Surat Al-Ankabut: 6), Islam selalu menekankan agar manusia bekerja keras atau sungguh-sungguh, selalu optimis atau berpengharapan, selalu berusaha memperbaiki nasib, memanfaatkan peluang, tidak berhenti ikhtiar, dan secara umum manusia diharapkan agar tidak berbuat kerusakan di daratan maupun di lautan, selalu menjaga kelestarian lingkungan dan lain-lain.

Kedua, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon-progo. Sasaran KKN memilih lokasi di dusun Keso desa Banyuroto dengan pertimbangan, letaknya terisolir atau terpencil, dan selama ini belum pernah dijadikan lokasi KKN. Dusun ini merupakan dusun yang paling tertinggal dari dusun-dusun lain dalam wilayah desa Banyuroto. Berada di seberang sungai, dan untuk menuju ke dusun ini, harus melalui jalan tanah (belum ada pengerasan jalan), melingkar sepanjang 2,5 km. Wajar apabila penduduknya justru berkurang, karena kaum mudanya merantau ke luar daerah. Dusun Keso terdiri dari 3 kampung, yakni Banyumeneng (24 KK), Keso (3 KK), dan Banaran (17 KK), jumlah keseluruhan ada 44 KK.

Tidak berlebihan manakala dikatakan dusun ini layaknya sebuah dusun di pulau Jawa pada era 50 atau 60-an, atau untuk ukuran sekarang, ketinggalan sekitar 30-35 tahun. Selain banyak kaum muda yang merantau, dan kaum tua berangsur-angsur berkurang, rumah yang ada tiada berpenghuni, sehingga satu demi satu rumah tersebut dibongkar, dan kembali menjadi tanah pekarangan. Tanah pekarangan di mana di atasnya dulu berdiri rumah, masih dijumpai di sana-sini, dengan jajaran pohon kelapa yang cukup tua atau tinggi batangnya yang menunjukkan daerah ini sudah lama dihuni dan pepohonannya sudah cukup lama pula ditanam. Akhirnya



jadilah kampung-kampung di dusun Keso hanya terdiri dari 24, 3 dan 17 KK.

Sebenarnya, Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dieksploitasi cukup memadai, tersedia seperti: batu kapur, batu kali, batu-bata, kayu bahan bangunan (jati, meranti, sono keling, sedikit mahoni), kayu bakar dan daerahnya cukup basah (ada sumber air). Apabila rerumputan atau tanaman rumput gajah dikembangkan, daerah ini juga potensial untuk peternakan. Jumlah penduduk sedikit (SDM), hanya 152 jiwa, dengan sekitar 35 orang yang merantau. Jumlah ini tergolong sedikit apabila dibandingkan dengan luas wilayah, dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Dengan menyadari kondisi obyektif seperti itu, kegiatan operasional KKN disesuaikan dengan hasil dialog dengan masyarakat setempat, program-program sektoral apa saja yang bisa dilaksanakan, dan pelaksanaannya (dengan dibantu oleh Kepala Dusun dan Ketua RT) disesuaikan dengan jadwal kegiatan masyarakat setempat, seperti pertemuan atau pengajian setiap malam Rabu Pahing, malam Rabu Pon, malam Kamis Kliwon, malam Sabtu Pon, malam Ahad Pahing (selapanan), dan lain-lain. Sedang kegiatan untuk kaum ibu, sore hari.

Sesuai dengan tema besar mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada penyuluhan-penyuluhan keagamaan, lingkungan hidup, etos kerja, peningkatan pemberdayaan perempuan, pemanfaatan lahan pekarangan, sawah, atau ladang, dan lain-lain. Dengan bahasa yang sederhana, ditumbuhkan suatu pemahaman dan kesadaran bahwa kekayaan alam berupa hutan, lautan, pertambangan, pertanian, ladang dan sebagainya, menawarkan kepada setiap warga negara atau penduduk untuk secara kreatif dan inovatif mengolahnya.

Seharusnya setiap usaha di sektor apapun harus dilakukan dengan tekun, sebab tidak ada sesuatu yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma atau tanpa usaha/bekerja. Bekerja adalah satu-satunya pangkal tolak bagi setiap manusia dalam mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari bagi dirinya sendiri serta keluarganya. Dilihat dari segi kejujuran, ada dua macam pekerjaan, yaitu pekerjaan dengan jalan positif dan negatif. Pekerjaan yang positif mutlak didasarkan atas kejujuran, kerja keras, hemat, menghargai waktu, tunduk pada undang-undang atau peraturan yang berlaku; sedangkan pekerjaan yang negatif adalah sebaliknya.

Sebagai bentuk stimulan agar masyarakat tumbuh etos kerjanya dan menumbuhkan iklim wirausaha, serta mendorong keaneka ragaman usaha,

kepada mereka diberikan bantuan dalam bentuk kail, bukan ikan, berupa: alat cetak batako, bibit mangga, rambutan, melinjo, kelapa hibrida, akasia, alat pembuat emping mlinjo, alat pembuat minyak kelapa, bibit ikan gurameh, buku-buku PKK, panduan ekonomi praktis, keagamaan, peralatan ibadah dan meja belajar TPA (TKA).<sup>23</sup>

Dengan penyuluhan praktis (termasuk lewat pengajian) dengan tema lingkungan hidup, kesadaran hukum dan bernegara atau bermasyarakat, pemberdayaan perempuan, pemanfaatan lahan pekarangan, pemupukan etos kerja dan lain-lain dalam bentuk ceramah populer dan tanya jawab, dengan mengambil tempat di rumah Kepala Dusun, Ketua RT dan masjid Banyumeneng, berangsur-angsur kesadaran masyarakat sasaran untuk berusaha meningkatkan kualitas hidup dapat ditumbuhkan. Oleh karena menyangkut pola pikir dan merubah kebiasaan (*habitual action*), ke depan, rasanya, masih memerlukan waktu yang panjang.

Ketiga, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Lokasi yang dipilih adalah Dusun Ngepring, yang merupakan dusun wilayah atas dari lereng Merapi, tepat di tepi Kali Boyong, penerima aliran/ tumpahan lahar Merapi. Di titik ini merupakan daerah pengambilan pasir dengan kualitas istimewa yang diangkut ke berbagai wilayah, baik DIY maupun Jawa Tengah. Meskipun daerah pasir dan batu, dan penghasilan penduduk juga lumayan, ternyata rumah penduduk masih banyak ber-dinding bambu. Penghasilan penduduk dibelanjakan dengan tidak produktif, air minum juga agak sulit diperoleh. Melihat tata pisik bangunan, perilaku keseharian, pengamalan ajaran agama, dan penampilan mereka, nampak merupakan daerah tertinggal. Penyuluhan agar mereka mampu menyisihkan penghasilannya untuk memperbaiki kualitas bangunan fisik rumah, mengurangi hal-hal yang bersifat konsumtif, meninggalkan kebiasaan yang negatif, merintis pengamalan ajaran agama dan secara makro berusaha meningkatkan kualitas hidup, agaknya memerlukan waktu yang panjang.

Pembinaan diarahkan pada peningkatan perikehidupan beragama dan upaya pemberdayaan di bidang ekonomi. Penyuluhan keagamaan dalam rangka peningkatan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penyuluhan peningkatan potensi Sumber Daya Manusia meliputi: pengajian Majelis Taklim, pembinaan TPA-TKA, penataran Guru TPA-TKA, Khatib

---

<sup>23</sup> PPM IAIN, *Laporan Pelaksanaan KKN Angkatan ke 43*, (Yogyakarta: PPM IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), p. 30

dan Da'i, pemanfaatan waktu luang, kebersihan lingkungan, kesehatan dan kependudukan, ciri-ciri keluarga pra sejahtera dan upaya mengatasinya, pemeliharaan MCK, kesadaran hukum dan kepemilikan tanah, cara memelihara tata batin agar tetap sehat, dan cara mengatasi hambatan atau gangguan kejiwaan. Meskipun jumlahnya belum banyak, dibantu juga buku-buku agama dan buku-buku untuk keperluan TPA-TKA, meja belajar TPA-TKA serta peralatan shalat untuk kaum perempuan. Adapun bantuan bagi pemberdayaan di bidang ekonomi, meliputi: pengadaan alat cetak batako dan konblok, gilingan beras, bibit mlinjo, durian, buku-buku di bidang peningkatan pendapatan ekonomi dan buku-buku PKK.<sup>24</sup> Oleh karena Kali Boyong merupakan sentra pasir, dengan diberikannya alat cetak batako dimaksudkan agar masyarakat terdorong membuat batako (pasir sudah tersedia, tinggal membeli semen), dan lambat laun dapat memugar rumah dari dinding bambu menjadi dinding batako atau tembok, dan selanjutnya rumah yang lantainya dari tanah, berubah terdiri dari semen atau plesteran, syukur apabila mampu memasang tegel. Dorongan agar kualitas hidupnya meningkat, secara berangsur-angsur disuntikkan kepada mereka. Pembinaan perikehidupan beragama masih menjadi kendala karena sedikitnya guru ngaji dan penyuluh agama, bahkan pembina agama berasal dari daerah lain. Pekerjaan jangka panjang adalah melakukan proses kaderisasi dalam berbagai bidang guna memandu kehidupan masyarakat desa ke arah kehidupan baru yang produktif dan semakin meningkatkan kualitasnya di masa datang.

Keempat, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Desa Umbulharjo merupakan wilayah paling atas di punggung gunung Merapi, sejajar dengan desa Kepuharjo yang juga masuk wilayah kecamatan Cangkringan. Di sebelah barat, desa Umbulharjo berbatasan dengan desa Hargobinangun Kecamatan Pakem. Lokasi garapan KKN berada di dusun Plosokerep, yang merupakan dusun paling tertinggal dibanding dusun-dusun lain di desa Umbulharjo. Wilayahnya terdiri dari tanah pekarangan (berpasir) yang dimungkinkan merupakan luapan lahar Merapi sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga tidak cocok untuk ditanami palawija, apalagi padi. Masyarakat menanam tanaman keras, memelihara ternak dan membuat cobek batu (keperluan rumah tangga).

Menurut penuturan Kepala Dusun Plosokerep, pembuatan (industri rumah tangga) cobek batu ternyata sudah berlangsung secara turun te-

---

<sup>24</sup> PPM IAIN, *Laporan Pelaksanaan KKN Angkatan ke 42*, p. 27

murun, dengan teknik yang sederhana. Oleh karena daya serap pasar dari daerah luar cukup besar, kaum muda Sambisari dan Plosokerep semakin telaten menekuni kerja sambilan ini, yang akhirnya menjadi kerja sambilan yang diprioritaskan, karena hasilnya cukup lumayan. Di sepanjang jalan pinggir kampung, bertumpuk jenis batu tertentu, bahan baku pembuatan cobek batu dan alat penggerusnya (alat pembuat sambal, *layah* dan *muntu* = Jawa), juga pembuat *lumpang* (Jawa), alat pembuat tepung. Dalam bentuk komunal, mereka duduk berjajar dengan atap daun kelapa (mengurangi pancaran sinar matahari), dengan tekun mematah batu dibentuk menjadi cobek dan semacamnya. Persoalan yang muncul adalah proses *finishing* yang lambat karena menghaluskan cobek masih dengan cara manual. Pembuatan cobek agaknya dapat diakselerasi dengan menggunakan teknologi tepat guna; yang pada gilirannya jumlah produksi meningkat dan penghasilan bertambah.

Guna memberikan dukungan bagi kegiatan masyarakat agar mempunyai nilai ekonomi tambah, dialokasikan bantuan guna pengadaan: pleser atau grindo (alat penghalus cobek batu dengan tenaga listrik) dan tatah batu (baik pipih maupun runcing), alat cetakan batako dan konblok, *kletek* atau *kseran* (alat angkut material), bibit rambutan, mangga, sengon atau albasia, bantuan ternak kambing (untuk digaduh) dan buku ekonomi serta PKK.<sup>25</sup>

Penyuluhan bagi pengembangan mental wirausaha bagi masyarakat pedesaan, dilakukan penyuluhan pemeliharaan ternak bagi peningkatan tambahan penghasilan petani, penyuluhan strategi pemasaran hasil-hasil home industri, penyuluhan pemanfaatan limbah batu untuk bahan bangunan, penyuluhan wirausaha bagi pemuda masjid, penyuluhan macam-macam penyakit tanah, pemanfaatan tanah-tanah kosong agar tidak menjadi lahan tidur, penyuluhan kebersihan lingkungan dan penghematan air bersih, penyuluhan penanaman rumput gajah (pakan ternak), penyuluhan kepemilikan tanah, dan lain-lain.

Sedangkan penyuluhan peningkatan kehidupan ruhani masyarakat, dilakukan pengajian dan peningkatan kegiatan majelis taklim, pelatihan guru TPA-TKA, pelatihan imam, khatib, takmir masjid, dan da'i atau muballigh. Hal ini dilakukan agar kemiskinan ruhani dan jasmani lambat laun dapat diperkecil.

Kelima, Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 34.



Desa ini masuk tata administrasi kecamatan Wonosari bagian selatan, jalur menuju pantai wisata Baron, Gunungkidul. Wilayahnya terdiri dari batu kapur muda, kritis, tandus, tetapi masyarakatnya memiliki etos kerja yang tinggi, dan sebagian kaum mudanya menjadi kaum migran ke berbagai kota. Meskipun desa ini selama bertahun-tahun sudah digarap oleh PKAK (Proyek Peningkatan Kesejahteraan Anak dan Keluarga), yang mungkin banyak menekankan pada santunan di bidang ekonomi, berdasarkan survey pendahuluan para mahasiswa, nuansa kehidupan beragama masyarakatnya masih memprihatinkan. Sasaran kegiatannya di dusun Mulo desa Mulo kecamatan Wonosari, khususnya di RT 08. Secara fisik, penataan rumah, pembuatan bak penampung air hujan, penanaman tanaman keras dan palawija sudah mulai nampak, tinggal memupuk minat masyarakat untuk semakin meningkatkan upaya pemberdayaan di bidang ekonomi. Mengapa masyarakat masih tetap nampak miskin? Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang mengindikasikan banyaknya pengeluaran daripada penghasilan. Banyak kegiatan yang masuk kategori pemborosan, seperti main kartu dengan taruhan uang (boros waktu, uang dan kurang menghargai waktu untuk istirahat), sehingga di siang hari kurang produktif.

Kegiatan mahasiswa dengan dipandu oleh Dosen Pembimbing Lapangan, diarahkan agar dengan hati-hati dan pelan-pelan mereka mengadakan gesekan kepada masyarakat tentang etos kerja yang positif. Etos kerja positif disodorkan ke tengah-tengah masyarakat melalui media kontak person, kegiatan majelis taklim, arisan, dasa wisma, selapanan maupun kelompok masyarakat, dalam butir-butir berikut: (1) setiap orang agar berpikir teliti, berpandangan kreatif dengan imajinasi konstruktif; (2) membiasakan membangun disiplin diri; (3) membiasakan hidup hemat dan menabung; (4) membiasakan diri memberikan lebih daripada yang diterima; (5) memperhatikan kesehatan diri; (6) tunduk dan bersyukur kepada Allah untuk mendapat ridla-Nya atau bertawakal; (7) mempraktekkan keimanannya dan membiasakan diri memperhatikan hukum alam; (8) hendaknya manusia selalu bersungguh-sungguh menurut kadar kemampuannya; (9) sebagian besar yang dimakan atau dimanfaatkan manusia adalah dari hasil usahanya; (10) hendaknya manusia menyeimbangkan antara kerja, ibadah dan istirahat; (11) nasib manusia lebih banyak ditentukan atas usahanya sendiri; (12) jangan iri hati terhadap harta orang lain, bekerja keras untuk mendapat harta.

Sebagaimana lokasi-lokasi lain, program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan diarahkan dengan mendorong masyarakat (dengan



usahanya sendiri) agar melepaskan diri dari lilitan kemiskinan, dengan memupuk kerja keras. Kepada masyarakat dialokasikan bantuan pengadaan bibit tanaman, peralatan tukang batu dan kayu, bantuan ternak kambing, buku-buku (agama, ekonomi dan PKK), peralatan ibadah/mukena dan bantuan stimulan bagi pembangunan masjid.<sup>26</sup>

Secara umum, masalah-masalah sosial keagamaan di pedesaan (meskipun dari desa yang satu dengan yang lain keadaannya bervariasi) memang cukup memprihatinkan. Selain kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa yang relatif belum baik, terasa benar kurangnya pemimpin atau pemuka agama pada tingkat lokal, kurangnya sarana ibadah, kurangnya wadah atau lembaga yang menangani kegiatan keagamaan secara teratur (terutama yang menyangkut dengan kegiatan pendidikan agama bagi anak-anak), kurangnya contoh pengamalan ajaran agama dari pemimpin formal kurang nampaknya suasana hidup beragama masyarakat pedesaan dan banyaknya berbagai bentuk tindakan amoral di mana kontrol masyarakat semakin kurang atau cenderung permisif.

Masyarakat desa, karena tidak memiliki akses yang luas selain sumber penghidupan dari sektor pertanian (yang nilainya relatif rendah), guna mencukupi biaya hidup minimal, terbatas. Apabila dibandingkan dengan kondisi kehidupan pada dekade 50-an atau 60-an, keadaan sekarang memang relatif lebih baik. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kondisi kehidupan masyarakat kota (bukan warga kota pinggiran), di bidang pendidikan, rasanya memang ketinggalan. Dengan hasil pertanian yang mereka usahakan, aset untuk mendapatkan pendidikan tinggi relatif sulit mereka capai.<sup>27</sup>

Yang dimaksud dengan pemimpin agama dalam konteks ini adalah pemuka-pemuka agama yang mampu membimbing masyarakat dalam hidup beragama sehari-hari, yang menyatu dengan yang dibimbing; pemuka agama yang mampu menjabarkan, menterjemahkan butir-butir ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu memimpin ke-

---

<sup>26</sup> PPM IAIN, *Laporan Pelaksanaan KKN Angkatan ke 43*, p. 15.

<sup>27</sup> Sebagai catatan untuk sekedar contoh, perlu diketahui, untuk menghasilkan gabah 1 kg seharga Rp. 1.200,- - Rp.1.500,- diperlukan biaya sekitar Rp. 600,- sampai Rp.800,- yang meliputi pengadaan bibit, biaya pengolahan tanah, penyiangan, pemupukan, obat-obatan pembasmi hama, pemeliharaan air, waktu yang diperlukan (sekitar 120 hari), dan belum lagi resiko kalau padi rusak atau gagal panen oleh karena iklim atau angin ribut atau hama tikus, dan lain lain. Tidak termasuk di dalamnya tenaga kerja dari si petani yang bersangkutan. Belum lagi apabila masa panen, harga turun secara drastis (karena permainan tengkulak).

giatan-kegiatan ritual agama. Kurangnya pemimpin agama ini disebabkan kurangnya proses kaderisasi, kurangnya kaum muda yang tekun mempelajari atau mendalami ajaran-ajaran agama maupun lingkungan yang kurang kondusif bagi munculnya suasana hidup yang agamis.

Jumlah sarana ibadah bagi kaum muslimin di pedesaan nampak agak meningkat pesat pada 25 tahun terakhir, meskipun ditinjau dari segi kualitas dan kemakmuran masjid, belum memadai. Di dusun-dusun tertentu yang agak terpencil dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sarana ibadah tersebut baru berdiri pada dekade 90-an dengan dorongan kelompok-kelompok mahasiswa KKN, dari angkatan ke angkatan. Meskipun dana murni dari mahasiswa KKN sangat terbatas, ternyata prakarsa dan dinamika operasional mereka di lapangan cukup signifikan dalam mendorong munculnya swadaya masyarakat.

Betapapun sebelum sarana ibadah tersebut berdiri kaum muslimin sudah melaksanakan kegiatan ibadah di rumah-rumah penduduk, dapat dipahami, kualitas beragama mereka masih belum menggembirakan. Bahkan, akan banyak kita dapati lapisan kaum tua (bapak maupun ibu) yang masa kecil atau mudanya tidak mendapatkan lingkungan dan pengalaman hidup beragama dari lingkungan sekitar atau orang tuanya dengan baik, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual. Kehidupan mereka akhirnya dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, naluri, adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyangnya dengan tidak mempersoalkan semuanya itu bertentangan dengan ajaran agama atau tidak. Dalam kondisi seperti ini, lapisan kaum tua akan sangat lamban untuk menerima dan melaksanakan ritual keagamaan.

Dengan minimnya lembaga yang menangani kegiatan keagamaan, dan semakin kurangnya perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya ruhani anak-anak, - kelak-, dikhawatirkan akan didapati generasi muda yang akan acuh terhadap kehidupan beragama.

Kurangnya contoh pengamalan ajaran agama dari para pemimpin akan membawa dampak negatif, apalagi jika yang muncul justru contoh pengingkaran dari ajaran agama. Hal ini dapat dipahami, karena masyarakat kita memiliki sifat gampang mencontoh (imitasi) terhadap apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Mereka cenderung meniru apa yang dikerjakan oleh pemimpinnya (terlebih dengan provokatif), dengan tidak kritis. Sifat paternalistik seperti itulah yang menjadi faktor penyebab lambatnya kemajuan. Pemimpin formal yang ada di pedesaan, umumnya pada masa kecil mereka (sebagaimana umumnya dunia kanak-kanak pada masa

itu), juga kurang mendapatkan pengalaman hidup beragama secara utuh. Mereka belum banyak belajar dan mendapatkan pengalaman hidup beragama, sehingga memasuki masa remaja dan apabila kelak dewasa, tidak mendapatkan pengalaman hidup beragama secara memadai, kecuali sedikit yang secara khusus masuk madrasah atau pesantren.

Sedang kurang nampaknya suasana hidup beragama masyarakat di pedesaan, dari daerah ke daerah, sifatnya fluktuatif, tidak bisa disamaratakan. Tantangan seperti ini menarik bagi mahasiswa peserta KKN, yang umumnya memiliki idealisme yang tinggi (dan juga berasal dari desa), dan dari sisi ini, program-program yang realistis dan terjangkau dari segi waktu, disusun bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Banyaknya tindakan amoral di tengah masyarakat disebabkan oleh longgarnya masyarakat memegang norma moral, ajaran agama dan longgarnya kontrol sosial. Untuk menanggulangi persoalan ini, harus ditumbuhkan suatu kesadaran bersama bahwa kehidupan masyarakat harus seimbang antara kebutuhan lahiriyah dan batiniah, dan agar supaya tidak terbiasa terjadi pelanggaran secara terus-menerus dari bentuk yang kecil ke arah yang lebih besar, seluruh anggota masyarakat dari yang paling kecil sampai kepada para pemimpinnya, harus sadar untuk selalu menangkal dan mencegah setiap bentuk tindakan negatif yang terjadi di lingkungannya.

Untuk mengakhiri analisis ini kiranya perlu ditekankan pentingnya upaya-upaya kecil untuk mengentaskan kemiskinan (ekonomi dan agama), melalui program Kuliah Kerja Nyata, dengan upaya yang tidak mengenal lelah dan berkesinambungan. Hidup dalam kemiskinan adalah merupakan kondisi riil hidup dengan tingkat konsumsi pelbagai kebutuhan hidup di bawah ukuran normal. Hal ini tidak saja mempengaruhi status sosial dan pola hidup, tetapi juga keadaan fisik, keadaan kesehatan secara umum, keadaan dan keragaman makanan dan juga harapan hidup yang mungkin lebih pendek. Sedangkan kemiskinan agama merupakan sebuah kondisi serba menipisnya atau tiadanya kehidupan ruhani pada diri seseorang atau masyarakat sehingga berakibat munculnya suasana hidup yang gersang. Kemiskinan agama yang melanda kelompok masyarakat akan berakibat kehidupan masyarakat itu tidak memiliki pegangan, tidak mampu menghayati makna kehidupan, sehingga hidupnya menjadi rapuh, terlebih lagi apabila secara makro kemiskinan agama melanda kehidupan suatu bangsa.

Deskripsi di atas juga menunjukkan, meskipun pelaksana Kuliah Kerja Nyata terdiri dari mahasiswa IAIN pada semester akhir itu berasal dari

disiplin ilmu agama Islam, pada umumnya mereka mampu mengakomodir banyak program yang bersifat lintas sektoral, banyak bidang dan komprehensif, karena kerjasama dengan berbagai pihak, terutama instansi terkait. Program menyangkut banyak sektor yang berhubungan dengan hajat hidup dan peningkatan kualitas hidup masyarakat khalayak sasaran. Bidang prasarana fisik, lingkungan hidup, administrasi pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, keluarga berencana dan berbagai penyuluhan di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan membawa perubahan cara berfikir masyarakat ke arah yang lebih maju. Kemajuan desa/daerah/wilayah pada hakekatnya bertumpu pada usaha keras penduduk desa sendiri dengan dorongan dari berbagai pihak.

Optimalisasi upaya pengentasan kemiskinan melalui program Kuliah Kerja Nyata, secara mendasar sebenarnya lebih banyak bergantung sampai di mana daya serap masyarakat/khalayak sasaran dalam menindaklanjuti program-program KKN dan sampai sejauhmana usaha masyarakat untuk mengentaskan diri dari lilitan keterbelakangan, kemiskinan dan minimnya pengetahuan, yang berasal dari dorongan diri mereka sendiri.

Pada umumnya, masyarakat yang lebih responsif akan lebih cepat menerima perubahan-perubahan dan akan lebih cepat menikmati hasil positif dari perubahan-perubahan atau pembaharuan-pembaharuan itu. Apabila program-program yang ditetapkan itu belum selesai dilaksanakan pada umumnya dilanjutkan oleh masyarakat atau ditindak lanjuti oleh mahasiswa peserta KKN pada angkatan berikutnya. Peran pokok mahasiswa peserta KKN adalah motivator dan dinamisator masyarakat, bukan fasilitator. Melihat perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang tidak mudah, harus mengetahui kondisi dan keadaan wilayah/masyarakat sebelum program-program bagi perubahan itu dilaksanakan; dan proses perubahan itu tidak akan secepat seperti yang diinginkan oleh para pekerja sosial, sebab proses itu menyangkut banyak dimensi. Yang dirubah tidak saja daerah secara fisik, tetapi merubah manusia sebagai penghuni suatu daerah tersebut. Oleh karena manusia sebagai makhluk multi dimensi, kita pahami kesulitan-kesulitan tersebut.

Apabila dicermati dari laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari angkatan ke angkatan, secara kuantitatif, hasil KKN menunjukkan 85% s.d. 90% mencapai target, sedang secara kualitatif, dengan memperhatikan masukan-masukan dan penilaian dari berbagai pihak, menunjukkan hasil baik. Program yang disusun cukup realistis, adaptatif dan responsif; ditunjang oleh proses sosialisasi pelaksana program yang cepat menyatu dengan masyarakat.



Betapapun program-program KKN IAIN hanya merupakan salah satu bentuk upaya mensejahterakan masyarakat/mengentaskan kemiskinan daerah-daerah yang tertinggal/miskin, di samping banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, rasanya tidak berlebihan manakala dinyatakan bahwa ia sudah memberikan andil yang cukup berarti bagi upaya-upaya mendasar jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan dalam usaha menciptakan masyarakat adil yang berkemakmuran dan masyarakat makmur yang berkeadilan.

Keberhasilan program-program KKN tidak lepas dari adanya faktor pendukung yang meliputi :

1. Adanya kerjasama dan sistem koordinasi yang harmonis antara peserta KKN selaku pelaksana utama dari program-program yang telah disusun.
2. Terciptanya hubungan yang baik antara peserta KKN, dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Panitia Pelaksana KKN, Aparatur Pemerintah, Institut dan masyarakat luas.
3. Adanya penilaian yang positif terhadap KKN dan peran aktif mahasiswa dalam berbagai kegiatan di tengah-tengah masyarakat.
4. Semangat gotong-royong yang tinggi dari masyarakat dalam berbagai kegiatan.<sup>28</sup>

Sedang beberapa faktor yang menghambat antara lain: terbatasnya waktu yang tersedia (setiap angkatan hanya 2 bulan), terbatasnya dana, penghasilan penduduk yang belum memadai/masih rendah, tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah (sehingga sulit untuk menerima perubahan-perubahan), sulitnya transportasi (bahkan ada beberapa daerah yang masih terisolir), masih terdapatnya aparat pemerintah/desa yang kurang responsif, terdapatnya sebagian generasi muda yang kurang diajak kerjasama dan lain-lain.

## V. Simpulan

Untuk mengakhiri uraian ini perlu dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kuliah Kerja Nyata IAIN telah menyusun dan melaksanakan program-

---

<sup>28</sup> Zainal Abidin (Ed.), *Laporan dan Kumpulan Makalah Seminar Sehari: Re-Orientasi-Evaluasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)*, (Yogyakarta: BPPM P3M IAIN, 1993), p. 13



- program yang strategis bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah pinggiran kota, yang dirangkum dalam bidang-bidang: agama, phisik dan lingkungan hidup, administrasi pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan keluarga berencana. Pelaksana program mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga/instansi terkait dan para petugas penyuluh lapangan.
2. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hasil-hasil KKN IAIN (secara kuantitatif maupun kualitatif) berangsur-angsur dapat mengantarkan masyarakat dari himpitan kemiskinan, baik kemiskinan materi maupun ruhani. Kemiskinan materi maupun ruhani meliputi banyak hal: kemiskinan papan, sandang, pangan, pendidikan, pengetahuan, teknologi, dana, kesempatan, layanan, kehidupan kejiwaan/ruhani, ketentraman hidup dan rendahnya derajat kesehatan. Betapapun hasilnya belum maksimal, tetapi sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, dan hal tersebut dari waktu ke waktu perlu dievaluasi dan ditingkatkan.
  3. Optimalisasi upaya pengentasan kemiskinan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat ditempuh dengan mempertajam program-program KKN, mendorong dinamika kemandirian masyarakat, menggugah kerja keras aparat selaku pelayan masyarakat, meningkatkan kegiatan mahasiswa sehingga bermanfaat bagi usaha pembangunan daerah, dan dengan pengkajian kembali, evaluasi, reorientasi dan revitalisasi program-program KKN dari tahun ke tahun diharapkan sektor Kuliah Kerja Nyata tidak akan pernah merasa "jenuh" dan "kering wawasan".

## DAFTAR PUSTAKA

- Asma'i Arif, 2002, "Pokok-pokok Pikiran Tentang Desa Binaan KKN", *Makalah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – Departemen Dalam Negeri, 1993, *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*, Jakarta.
- Blower, Andrew dan Grahame Thompson, 1983, *Ketidak Merataan, Konflik dan Perubahan*, Penerjemah : Paul Sihotang, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1971, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an

- Depdagri, 1993, "Prospektif dan Problematika Pembangunan Desa Miskin", *Makalah Dies Natalis ke 44 UGM Tanggal 29 Nopember 1993*, Jakarta: Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri
- D.H., Penny, 1990, *Kemiskinan : Peranan Sistem Pasar*, Mubyarto (Editor), Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Garis-Garis Besar Haluan Negara R.I. Tahun 1993, Semarang: Aneka Ilmu
- Mahbub 'ul Haq, 1983, *Tirai Kemiskinan : Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mangkuprawira S., 1993, *Pendekatan Pengentasan Kemiskinan oleh Perguruan Tinggi*, Bogor: LPM - IPB
- Masri Singarimbun dan D.H. Penny, 1984, *Penduduk dan Kemiskinan : Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Bharata - Karya Aksara.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press.
- Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Mubyarto, 1993, "Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan", *Makalah Seminar Nasional Peranan IPTEK dalam rangka Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Panitia HUT KORPRI
- Parsudi Suparlan (Penyunting), 1984, *Kemiskinan di Perkotaan : Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan
- PPM IAIN, 2001, *Laporan Pelaksanaan KKN Angkatan ke 42*, Yogyakarta: PPM IAIN Sunan Kalijaga
- , 2001, *Laporan Pelaksanaan KKN Angkatan ke 43*, Yogyakarta: PPM IAIN Sunan Kalijaga
- , 1993, *Buku Pedoman KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-24*, Yogyakarta: BPPM-P3M IAIN Sunan Kalijaga
- , 1993, *Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: BPPM - P3M IAIN Sunan Kalijaga
- Safrudin, 1993, "Iptek Pedesaan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan", *Makalah Seminar Nasional Peranan IPTEK dalam rangka Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Panitia HUT KORPRI
- Sayogya, 1986, *Metode Pemecahan Masalah Masyarakat dan Margono Slamet, Metodologi Pengabdian pada Masyarakat*, Lampung: Badan Penerbit Unila
- , 1991, *Menanggulangi Kemiskinan : Beberapa Pokok Persoalan*, Bogor: Fakultas Pertanian IPB
- Sri Sultan Hamengkubuwana X, 1993, "Desa Tertinggal di DIY:

Permasalahan dan Strategi", *Makalah Seminar Nasional Peranan IPTEK Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Panitia HUT KORPRI

Sunjoto, 1993, "Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kehidupan Pedesaan", *Makalah Seminar Nasional Peranan IPTEK dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Panitia HUT KORPRI

Syatiry, Abdul Azis bin Abdurrahman Asy, 1994, *Menyantuni Kaum Dhu'afa, Anak Yatim, Janda dan Orang Miskin*, penerjemah: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al Kautsar

Zainal Abidin (Editor), 1993, "Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)", *Makalah Seminar Sehari*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

